Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Jateng
gayeng

Uji Publik

DPRD Provinsi Jawa Tengah

tentang

RAPERDA HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH

Selasa, 25 Juli 2023

09.00 WIB - Selesai

The Sunan Hotel Solo

- Budi Santoso, Satpol PP : Kami sebelumnya di Biro Sosial, Kulo diaturl untuk memberikan tali asih kepada Gubernur. Sebelumnya kami selalu di tolak, karena kenapa tanggal hari jadi tidak diubah. Lurusan sejarah, yang disampaikan Prof Yeti, ini adalah kearifan yang perlu untuk dipelihara. Kami setuju jika diubah tanggal 19 Agustus 2023.
- Hatta, Dinkop Jateng: Apresiasi kegiatan Uji Publik ini, Jaman sekolah Sejarah menjadi suatu hal yang menarik. Sedikit saja, untuk Prof Yeti, dalam rangka biar tidak ada gejolak lagi, Ketika diputuskan tanggal 19 Agustus, di Jatim itu ditetapkan 19 Agustus tetapi hari jadi 12 Oktober saat boyongan gub pertama. Membaca dari slide, kalua tercatat Pandji suroso tanggal 5 Sept atau 18 Agustus, biar tidak bias.

- Kab Pemalang, Tarsidik: Masukan redaksi di Bab 4, tema hari jadi Prov Jateng. Dalam bab 3 mengenai peringatan, pasal 8 ini tertulis dalam setiap hari jadi. Kemudian dalam pasal 9 juga perlu dimasukkan kata “Peringatan Hari Jadi”
- Dalam perda ini belum mencerminkan jateng sebagai pusat budaya, atau sebagai sesuatu yang memiliki nilai edukasi nilai jawa. Sebagai contoh, dalam perda kabupaten memasukkan sesanti. Sebagai contoh di pemalang, ada bab sesanti, “Pancasila kaloka panduning nigari”. Usul dimasukkan sesanti yang menjadi nilai budaya yang dibawa di jawa tengah.

- Jawab Prof Yeti:
- Dari Pak Hatta, ada potensi untuk pertanyaan kritis untuk tanggal tanggal tersebut. Mungkin kalau nanti ada yang bertanya kok tidak 18 Agustus, 18 Agustus UUD baru digedok, maka tidak mungkin 18 Agustus dilantik. Penetapan Pandji Suroso ada literatur di Unnes. 19 Agustus sudah ada UUnya, UUnya dipegang saja. Hal yang diluar pikiran kita pasti ada. 19 Agustus ada narasi dalam Perdanya. Jatim ya biarkan saja, karena Hari Jadi keputusan Politik yang didasarkan pada hasil kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Jateng mau ikut boyongan ya bisa dilihat secara jelas melalui biografinya.

- Jawab Pak Masrofi
- Ada masukan tambahan sesanti atau mungkin kata kata untuk jawa tengah, sudah ada perda no 9 tahun 84. sudah ada motonya dan lambang daerah ***prasetya ulah sakti bakti praja***. Tidak usah diulang lagi di perda hari jadi ini. Kita hanya membetulkan sejarah hari jadi provinsi jawa tengah yang selama ini jadi silang pendapat tentang hari jadi provinsi jawa tengah. Ya ini kesepakatan apa yang disampaikan prof yeti, ini keputusan politik. Yang pakai 15 agustus 1950 itu juga keputusan politik, yang ini juga sama tapi sudah mendekati sejarah yang ada. Tidak meniadakan sejarah, cumin yang tadi ada 18 agustus dilantik ada yang 5 sept dilantik masih keputusan politiknya tetap 19 agustus. Kalau jatim beda, mereka ambil pas boyongan. Tetapi kita tidak menghilangkan sejarah sejarah yang ada. Kalau 50 ada sejarah yang hilang

- Agnes Bag Hukum Boyolali: Terkait draft raperda sebagai pengganti perda 7 2004, kami melihat dalam beberapa pasal yang tidak konsisten, dasar mengingat kita Bersama sama biro hukum untuk kemendagri tidak dimasukan hanya cukup di Perda saja. Konsistensi uu 13 2003 ketentuan umum itu adalah yang berulang ulang dalam batang tubuh. Pasal 1 ayat 4, tentang Menteri dalam negeri padahal tidak ada yang membahas Menteri dalam negeri. Kemudian konsistensi dalam pasas 1 ayat 8, paripurna hari jadi padahal pasal 5 dan 6 menjadi rapat paripurna dprd, kemudian pasal 5 jadi acuan pasal 6 jadi rapat paripurna istimewa. Di Draft masih berubah ubah masih perlu disesuaikan. Pasal 9 dari APBD dan yang sah, konjungsi dan itu harus dicukupi, saran kami pakai dan atau saja. Lebih baik penggunaan “harus sudah” itu hilang tetapi akan menjadikan arti dalam perda ini ditetapkan sejak.

- Wiji kab Kudus: Usul Karena yang namanya wilayah dengan pemerintahan dan batas batas yang jelas, pada bagian penjelasan kalau memungkinkan meliputi wilayah mana saja, jadi biar menguatkan
- Pak Kirno: Tertarik dengan pak Budi, sebetulnya siapa sih yang akan menentang. Ketika beliau ditugaskan memberikan tali asih, beliau beliau menolak tanggal hari jadi saat itu. Semua warga jawa tengah sudah ada pemahaman mengenai ini, saya yakin kemarin itu kalau ke daerah daerah, saya tanyakan hari jadi jateng tanggal berapa, banyak warga yang tidak tahu. Yang penting bukan yang menolak, tetapi mereka tau, prosesnya tidak menyimpang, mustinya hari ini dating pada uji public. Sepertinya yang diundang Bupati sejawa tengah, besok harapannya bupati yang menolak hasil ini. Harapannya ada Catatan perwakilan dari daerah mana saja, sebagai bukti sah proses pembahasan mengenai hari jadi jateng ini.

- Pak Kirno: Saya sependapat dengan pak Masrofi, dengan ketetapan ini tidak ada 1 orang yang berjasa untuk Jateng dihilangkan. Sebetulnya untuk orang berjasa itu cukup diakui jasanya. Semnagat mikul duwur mendem jero orang yang berjasa pada Jawa Tengah. Pak Pandi Suroso sudah diangkat sebagai pahlawan nasional, Wongsonegoro belum apdalah sudah 3 kali jadi menteri di ERA setelah RIS sampai Dekrit, ada cabinet Ali sastroamidjojo – wongsonegoro. Tidak ada 1 daerah yang oleh pengusul disebutkan memasukan wilayah di Jawa Tengah. Betulkan soloraya bagian dari Jawa Tengah. Pandji suroso langka berkantor di Semarang saat itu. Kabupaten yang masuk di Jawa Tengah perlu untuk dimasukan dalam perda.

- Gus Yen dari Otda Kota Semarang: ini rencana akan digedok kapan? Barangkali ada kolaborasi Prov dan kota, missal bapak Wongsonegoro, kami kerap ke gatak untuk pemeliharaan Makam. Saat hari jadi ada beberapa kegiatan, jadi barangkali ada yang bisa dikolaborasikan.